

**PENILAIAN KESIAPAN PELAKSANAAN PENGURANGAN EMISI  
DARI DEFORESTASI DAN KERUSAKAN HUTAN (REDD+)  
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**Wiwin Effendy**  
[whiwien93@gmail.com](mailto:whiwien93@gmail.com)  
**Program Pasca Sarjana,**  
**Universitas Terbuka**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesiapan Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan REDD+ berbasis yurisdiksi dengan merujuk kepada aspek kebijakan, kelembagaan dan perangkat-perangkat REDD+. Metode pengumpulan data terdiri dari: 1. Wawancara (*interview*), dilakukan percakapan langsung antara pewawancara (*interviewer*) dengan orang kunci yang terpilih (*key informant*) untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian yang dilakukan; 2. Diskusi Kelompok Terfokus (*focus group discussion*), dilakukan dengan mengeksplorasi suatu kejadian terhadap penelitian agar dapat menghindari pemaknaan yang salah terhadap permasalahan penelitian kepada sekelompok informan yang telah dipilih dan dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan terhadap tujuan penelitian; 3. Pengamatan (*observation*), dilakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan berupa pengamatan dan pencatatan terhadap kejadian atau fenomena yang sebenarnya dalam sebuah penelitian; dan 4. Pengkajian dokumen (*document review*), mempelajari dan mengkaji dari beberapa dokumen yang relevan dengan penelitian. Teknis analisis data deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan proses dalam menganalisis, meringkas dan menggambarkan situasi dan kondisi terkini yang telah dikumpulkan dari berbagai metode pengumpulan data tentang permasalahan yang diteliti dan terjadi di lapangan. Dari hasil, analisis dan pembahasan terhadap keseluruhan penelitian dapat disimpulkan: 1. Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki kebijakan khusus tentang implementasi REDD+, namun sebagai modal awal telah terdapat Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD-TPB) serta 8 (delapan) kategori kebijakan yang relevan dan mendukung pelaksanaan persiapan REDD+; 2. Belum ada kelembagaan REDD+ di tingkat provinsi, namun demikian Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk membentuk kelembagaan REDD+ di tingkat sub-nasional; 3. Perangkat-perangkat REDD+ di tingkat provinsi belum ada, namun saat ini sedang berlangsung penelitian tentang FREL dan sudah dilakukan kajian awal terkait dengan kerangka pengaman lingkungan dan sosial; dan 4. Secara umum, Provinsi Kalimantan Utara belum dapat mengimplementasikan program REDD+, namun beberapa macam persiapan dapat dilakukan untuk memenuhi persyaratan untuk implementasi REDD+ sekaligus untuk mengakses pendanaan REDD+.

*Kata Kunci:., Kebijakan, Kelembagaan Penilaian kesiapan dan Perangkat REDD+*

**ASSESSMENT OF READINESS FOR IMPLEMENTATION  
OF REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION  
AND FOREST DEGRADATION (REDD+) IN THE PROVINCE  
OF NORTH KALIMANTAN**

**Wiwin Effendy**  
[whiwien93@gmail.com](mailto:whiwien93@gmail.com)  
**Graduate Studies Program**  
**Indonesia Open University**

**ABSTRACT**

This study aims to assess the readiness of North Kalimantan Province in the implementation of jurisdiction-based REDD+ by referring to the aspects of REDD+ policies, institutions, and instruments. Data collection methods consist of 1. Interview, direct conversation between the interviewer and the selected key person (key informant) to obtain answers to the research problems carried out; 2. Focus Group Discussions, conducted by exploring an incident in research in order to avoid misinterpreting research problems to a group of informants who have been selected and are considered to have experience and knowledge of the research objectives; 3. Observation, collecting data directly in the field by observation and recording of actual events or phenomena in research; and 4. Document review, studying and reviewing several relevant documents to the research. The technical analysis of qualitative descriptive data used in this research is a process of analyzing, summarizing, and describing the current situation and conditions that have been collected from various data collection methods about the research problems occurring in the field. From the results, analysis, and discussion of the research, it can be concluded: 1. North Kalimantan Province does not yet have a specific policy regarding the implementation of REDD+, but as an initial capital there has been a Governor Regulation of North Kalimantan regarding the Regional Action Plan for Reducing Greenhouse Gas Emissions (RAD-GRK) and Regional Action Plans for Sustainable Development Goals (RAD-TPB) and 8 (eight) categories of policies that are relevant and support the implementation of REDD+ preparations; 2. There is no REDD+ institution at the provincial level, however, the Provincial Government of North Kalimantan is committed to establishing a REDD+ institution at the sub-national level; 3. REDD+ instruments at the provincial level do not yet exist, however, research on FREL is currently underway and preliminary studies related to environmental and social safeguards have been carried out; and 4. In general, North Kalimantan Province has not been able to implement the REDD+ program, but several kinds of preparations can be made to fulfill the requirements for REDD+ implementation as well as to access REDD+ funding.

*Keywords: Institutions, Policies, Readiness assessment, and REDD+ Instruments*